

Hambatan dan Solusi dalam Implementasi Kurikulum Merdeka pada Jenjang Sekolah Dasar: Sebuah Kajian Literatur

Syasya Khoirin Nisa¹ Nono Hery Yoenanto² Nur Ainy Fardana Nawangsari³

^{1,2,3}Magister Psikologi Universitas Airlangga, Surabaya

syasya.khoirin.nisa-2022@psikologi.unair.ac.id

Abstrak

Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) jika ditinjau dari fakta di lapangan menunjukkan belum sepenuhnya terwujud karena berbagai persoalan, tidak terkecuali pada jenjang Sekolah Dasar. Maka dari itu penting dilakukan evaluasi, dimulai dengan mengidentifikasi hambatan sehingga tepat dalam menentukan solusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan sekaligus solusi dalam Implementasi Kurikulum Merdeka pada jenjang SD. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan tipe naratif. Data diperoleh melalui beberapa situs *database* yakni *Google Scholar*, *ResearchGate*, dan Garuda Kemdikbud, dengan total 10 jurnal terpilih dan sesuai kriteria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan dalam IKM berasal dari empat aspek, yaitu 1) terkait sarana-prasarana; 2) SDM guru dan tenaga pendidik, 3) kondisi siswa, keluarga, dan lingkungan; 4) ketimpangan kebijakan pemerintah. Adapun solusi bagi hambatan tersebut yaitu 1) memaksimalkan bantuan pendanaan dari pemerintah; 2) guru aktif mengikuti pelatihan (*workshop*) terkait IKM; 3) menjalin kerjasama yang baik pada semua warga sekolah, dan; 4) menerapkan kebijakan sesuai Kurikulum Merdeka jika terjadi ketimpangan kebijakan pemerintah.

Kata Kunci: Hambatan, Solusi, Implementasi Kurikulum Merdeka, Sekolah Dasar

Pendahuluan

Selain sebagai wadah untuk membina keilmuan, fungsi lembaga pendidikan yang tak kalah penting adalah membentuk moral dan kepribadian para peserta didik agar menjadi pribadi yang terpuji dan berkualitas (Rosidah, 2018). Karena menurut Hasanah et al., (2021), tolak ukur bangsa yang berkualitas dapat dilihat dari sejauh mana keberhasilan pendidikan dilaksanakan. Maka dari itu, pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan dan menciptakan manusia yang berkualitas, serta menjadi bangsa yang bermartabat dan dijunjung tinggi oleh bangsa lain. Hal ini sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana tertuang dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 yaitu:

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.”

Tujuan dari Pendidikan tersebut tercermin dan tertuang dalam sebuah kurikulum. Karena menurut Mubarak (2021) kurikulum merupakan kerangka atau program dalam suatu proses pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam sebuah pendidikan. Tujuan yang ingin dicapai tersebut kemudian dijadikan acuan dalam pembelajaran yang dilakukan di sebuah lembaga pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan dan kurikulum selalu berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Kurikulum didefinisikan sebagai perencanaan dalam pelaksanaan pendidikan dalam usaha mencapai tujuan pendidikan (Lubis, 2015). Kurikulum menurut UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan (Arifin, 2018).

Lebih lanjut tentang kurikulum, menurut Oktifa (2022) pada laman media akupintar.id, dunia Pendidikan Indonesia saat ini sedang dihangatkan oleh topik pengimplementasian Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah sebuah kurikulum yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, yang dihadirkan sebagai bentuk dukungan penuh terhadap perbaikan kurikulum di Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong dan berkebhinnekaan global (Rahmadayanti dan Hartoyo, 2022). Selain itu menurut Nugraha (2022) Kurikulum Merdeka adalah sebuah pengembangan kurikulum dari kurikulum sebelumnya yang salah satunya hadir sebagai upaya pemulihan dari krisis pembelajaran akibat pandemi Covid-19.

Dalam pelaksanaannya, Rahmadayanti dan Hartoyo (2022) menyebutkan bahwa Kurikulum Merdeka bisa menjadi opsi bagi sekolah yang telah siap melaksanakannya. Bagi sekolah yang belum siap melaksanakannya, masih terdapat opsi lain yang dapat dipilih, yaitu tetap menggunakan Kurikulum 2013 atau melanjutkan Kurikulum Darurat hingga dilakukannya evaluasi terhadap Kurikulum Merdeka pada tahun 2024. Menurut data Kemdikbud dalam Ulya (2022) pada laman media Kompas.com, sebanyak 142.000 sekolah di Indonesia telah siap dan bersedia mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Dengan demikian, sekolah tersebut harus bersiap untuk menjalankan kebijakan Kurikulum Merdeka beserta semua pembaharuan dan perubahan di dalamnya. Karena menurut Sasmita dan Darmansyah (2022) penerapan kurikulum merdeka sudah tentu akan membawa dampak dan perubahan secara signifikan mengenai guru dan tenaga pendidik di sekolah, baik dari segi administrasi, strategi dan pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, bahkan proses evaluasi pembelajaran.

Menurut Nurcahyono dan Jaya (2022) jika dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, Kurikulum Merdeka memiliki isi dan struktur yang lebih sederhana, mendalam, merdeka, relevan, dan interaktif. Selain itu juga terdapat beberapa perubahan dalam Kurikulum Merdeka, di antaranya: 1) ditiadakannya istilah Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) yang diganti dengan Capaian Pembelajaran (CP), yaitu rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. Hal ini berdampak pada asesmen pembelajaran, 2) sekolah diberikan keleluasaan untuk menerapkan model pembelajaran kolaboratif antar mata pelajaran serta membuat

asesmen lintas mata pelajaran, misalnya berupa asesmen sumatif dalam bentuk proyek atau penilaian berbasis proyek, 3) perubahan penamaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) menjadi Modul Ajar, dst. Melihat beberapa hal baru pada kurikulum merdeka, Nurcahyono dan Jaya (2022) memaparkan bahwa sangat penting dilakukan pengkajian dan evaluasi yang lebih mendalam untuk melihat efektivitas dan ketepatan dalam penerapannya. Karena menurutnya Implementasi Kurikulum Merdeka jika ditinjau dari fakta di lapangan menunjukkan belum sepenuhnya terwujud disebabkan oleh persoalan-persoalan akibat dari perubahan tersebut.

Persoalan atau hambatan dalam penerapan sebuah kurikulum adalah satu hal yang penting untuk diperhatikan. Karena menurut Khotimah & Sukartono (2022) kurikulum yang digunakan di sekolah sangat besar pengaruhnya terhadap aktifitas kelas dalam mewujudkan proses belajar mengajar yang berdaya guna bagi pembentukan pribadi siswa. Selain itu, kurikulum merupakan jantungnya pendidikan (Arifin, 2018) yang tentu harus dikenal dengan benar oleh masyarakat tentang konsepnya yang sebenarnya. Terlebih pada Kurikulum Merdeka yang saat ini masih dalam masa adaptasi dan baru beberapa bulan diluncurkan, tentu masih diperlukan sosialisasi dan persiapan yang matang oleh pelaksana kurikulum (Nurcahyono & Jaya, 2022). Beberapa hasil penelitian menemukan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam proses implementasi Kurikulum Merdeka, khususnya pada jenjang Sekolah Dasar. Fitriyah dan Rizki (2022) menemukan bahwa hambatan dalam pengimplementasian Kurikulum Merdeka pada jenjang Sekolah Dasar berasal dari kurangnya pemahaman guru terhadap karakteristik Kurikulum Merdeka, serta berbagai macam perubahan dalam Kurikulum Merdeka menjadikan guru merasa kurang antusias karena merasa terlalu banyak beban. Selain hambatan yang berasal dari guru, temuan dari Sasmita dan Darmansyah (2022) menunjukkan bahwa fasilitas dan akses sekolah juga menjadi salah satu hambatan dalam pengimplementasian Kurikulum Merdeka.

Maka berdasarkan beberapa temuan tersebut, topik tentang hambatan dalam Implementasi Kurikulum Merdeka pada jenjang Sekolah Dasar adalah topik yang menarik untuk dibahas. Namun berdasarkan hasil penelusuran, tulisan yang mengkaji tentang topik ini secara fokus dan spesifik dalam dunia literasi Indonesia tampaknya masih sangat terbatas. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam hambatan apa saja yang ada dalam proses implementasi Kurikulum Merdeka pada jenjang Sekolah Dasar beserta kajian tentang solusinya. Dengan harapan melalui tulisan ini dapat memberikan sumbangsih bagi dunia literasi pendidikan di Indonesia, sekaligus menjadi wawasan dan bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur atau *library research*. Kajian literatur menurut Marzali (2016) adalah sebuah penelusuran dan penelitian kepustakaan dengan membaca berbagai buku, jurnal, dan publikasi lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian, untuk menghasilkan satu tulisan berkenaan dengan topik tertentu. Dalam hal ini peneliti menggunakan kajian literatur dengan model *narrative review*. *Narrative review* adalah studi literatur yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan merangkum artikel yang telah diterbitkan

sebelumnya, menghindari duplikasi penelitian, dan mencari bidang studi baru yang belum diteliti (Ferrari, 2015). Adapun beberapa langkah yang harus ditempuh oleh seorang penulis dalam menyusun sebuah review naratif yaitu 1) memilih topik penelitian; 2) penelusuran literatur; 3) seleksi literatur berdasarkan protokol; 4) meringkas dan mensintesis temuan dari literatur; 5) mengintegrasikan dalam tulisan (Demiris et al., 2019).

Mengacu pada tahapan tersebut, maka langkah selanjutnya adalah membuat protokol kajian literatur sebagai acuan dalam mencari artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Protokol tersebut disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Protokol Pencarian Literatur

No	Kriteria	Keterangan
1.	Bidang :	Pendidikan
2.	Metode Penelitian :	Kualitatif dan Kuantitatif
3.	Batasan Tahun :	2021-2022
4.	Lingkup :	Pendidikan era Kurikulum Merdeka, Kurikulum <i>Prototype</i> , dan Sekolah Penggerak, yang berfokus pada jenjang Sekolah Dasar
5.	Bahasa :	Indonesia, Inggris
6.	Relevansi :	a. Berkaitan dengan implementasi Kurikulum Merdeka pada jenjang Sekolah Dasar b. Hasil penelitiannya mencantumkan hambatan, solusi, dan atau hambatan beserta solusinya.

Dalam tahap penelusuran artikel ilmiah, peneliti melakukan penelusuran beberapa artikel ilmiah pada beberapa situs *database* yaitu *Google Scholar*, *Research Gate*, dan Garuda Kemdikbud. Dalam proses pengumpulan literatur, peneliti menggunakan beberapa kata kunci yang terkait dengan topik penelitian, yaitu “Implementasi Kurikulum Merdeka SD”, “Sekolah Penggerak” dan “Hambatan Implementasi Kurikulum Merdeka”. Dari kata kunci tersebut kemudian peneliti sesuaikan dengan kriteria dalam protokol pencarian artikel.

Untuk bidang penelitian, peneliti memilih bidang pendidikan karena sesuai dengan bidang yang sedang dikaji dalam penelitian ini. Selanjutnya, penelitian dengan metode kualitatif dan kuantitatif dipilih dengan pertimbangan sumber yang empirik berdasarkan fakta lapangan kekayaan informasi dapat ditemukan dari penelitian dengan kedua metode tersebut. Untuk batasan tahun, peneliti membatasi artikel yang terbit dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 karena sesuai dengan tahun diresmikan dan diimplementasikannya Kurikulum Merdeka untuk pertamakalinya. Selanjutnya hanya artikel yang mencantumkan tentang hambatan dan solusi dalam pengimplementasian Kurikulum Merdeka di Jenjang Sekolah Dasar yang dipilih dalam tahap akhir. Dari penelusuran tersebut, diperoleh sepuluh artikel ilmiah dalam jurnal nasional yang relevan dengan topik penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Hambatan Implementasi Kurikulum Merdeka

Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim resmi meluncurkan sebuah kurikulum yang dirancang untuk mendukung pemulihan pembelajaran pasca pandemi COVID-19 dengan nama kurikulum merdeka. Kurikulum tersebut menurut Rahayu et al., (2022) merupakan sebuah pengembangan kurikulum yang lebih luwes dan berpusat pada materi mendasar serta mengembangkan keunikan dan kemampuan siswa. Namun Nurcahyono dan Putra (2022) menyebutkan bahwa jika dilihat dari pola yang muncul di lapangan, implementasi kurikulum merdeka ini menunjukkan belum sepenuhnya terwujud karena berbagai persoalan yang menjadi penghambat, tak terkecuali pada jenjang Sekolah Dasar. Beberapa hambatan dalam Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) pada jenjang Sekolah Dasar, berdasarkan hasil dari penelitian kebidpustakaan ini digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Rekapitulasi Hambatan IKM

No	Aspek	Wujud hambatan
1.	Fasilitas/sarana prasarana	1.1 Lahan yang terbatas (Rahayu et al., 2022).
		1.2 Terbatasnya laptop, gawai, dan akses internet (Rahayu et al., 2021).
		1.3 Keterbatasan akses dalam mendapatkan materi literasi (Sasmita dan Darmansyah, 2022).
		1.4 Buku paket siswa kurang lengkap (Angga et al., 2022).
2.	Tenaga pendidik/guru	2.1 Guru kurang antusias dan minim pemahaman terhadap isi/konteks Kurikulum Merdeka (Fitriyah dan Wardani, 2022).
		2.2 Guru dan tendik belum terlatih menerapkan pembelajaran sesuai paradigma baru, merasa rumit dan kesulitan (Sumarsih et al., 2022).
		2.3 Wawasan dan pengetahuan guru tidak memadai karena terbatasnya waktu pelatihan dan minim informasi tentang Kurikulum Merdeka (Rahayu et al., 2021).
		2.4 Sangat tidak dipahaminya perubahan mendasar pada Kurikulum Merdeka oleh guru, kepala sekolah, maupun pengawas (Zahir et al., 2022).
		2.5 Guru kesulitan dalam segi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran Kurikulum Merdeka (Nurcahyono dan Putra, 2022).
		2.6 Rendahnya <i>softskill</i> guru dalam memenuhi tuntutan dari Kurikulum Merdeka (Sasmita dan Darmansyah, 2022).
3.	Siswa, lingkungan, dan keluarga	3.1 <i>Mindset</i> seluruh warga sekolah belum terlatih dengan pembelajaran yang berpusat pada anak (Sumarsih et al., 2022).
		3.2 Kekurangkompakan siswa dalam kelompok proyek (Hidayati et al., 2022).

	3.3 Kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar dan keluarga siswa (Anridzo et al., 2022).
4. Pemerintah	4.1 Belum sinkronnya <i>mindset</i> pemerintah daerah dengan pemerintah pusat terhadap kebijakan Kurikulum Merdeka (Hidayati et al., 2022)
	4.2 Kurangnya pelatihan dan pemberian sosialisasi kepada para guru tentang konsep Implementasi Kurikulum Merdeka (Rahayu et al, 2021).

Berdasarkan tabel 2 dapat kita ketahui dalam Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) pada jenjang Sekolah Dasar terdapat beberapa hambatan yang berasal dari kondisi fasilitas (sarana prasarana), kondisi guru dan tenaga pendidik, kondisi siswa, lingkungan, keluarga, serta beberapa hambatan berasal dari kebijakan pemerintah.

Pertama, hambatan yang berasal dari kondisi sarana prasarana atau fasilitas sekolah. Kurikulum Merdeka yang telah diimplementasikan kurang lebih satu tahun ini masih mempunyai beberapa kekurangan atau kendala (Angga et al., 2022), salah satunya pada aspek sarana prasarana. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Rahayu et al., (2021) terbatasnya guru yang mempunyai laptop, gawai yang mumpuni, dan juga akses internet yang memadai menjadi salah satu hambatan dalam Implementasi Kurikulum Merdeka. Hal ini berdampak pada terbatasnya guru yang dapat mengikuti pelatihan *online* yang diselenggarakan pemerintah tentang Implementasi Kurikulum Merdeka. Sehingga dari keterbatasan tersebut mengakibatkan guru kurang optimal dalam mengikuti pelatihan. Padahal rangkaian pelatihan tersebut penting diikuti sebagai bekal guru dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Penelitian Sasmita dan Darmansyah (2022) juga menemukan hambatan tentang keterbatasan akses untuk mendapatkan materi literasi. Selain itu, penelitian Angga et al., (2022) juga menemukan hambatan berupa terbatasnya buku paket (sumber belajar) yang dimiliki siswa. Hambatan dalam hal sarana prasarana juga dirasakan pada beberapa Sekolah Penggerak. Kurikulum Merdeka yang erat kaitannya dengan pembelajaran berbasis proyek penguatan profil Pancasila, tidak dipungkiri memerlukan fasilitas dan biaya yang bervariasi jumlahnya (Hidayati et al., 2022). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahayu et al., (2022) keterbatasan sarana prasarana pada beberapa sekolah penggerak di antaranya adalah kurangnya lahan yang dimiliki oleh pihak sekolah dalam menunjang pembelajaran berbasis proyek di luar kelas.

Hambatan kedua adalah terkait kondisi SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimiliki oleh guru dan tenaga pendidik. Dalam kaitannya dengan Implementasi Kurikulum Merdeka, guru menurut Fitriyah dan Wardani (2022) sebenarnya masih merasa resah, meskipun dalam beberapa penelitian telah menunjukkan kesiapannya dalam IKM. Kondisi kesiapan guru dan tenaga pendidik dalam Implementasi Kurikulum Merdeka adalah satu hal yang tak kalah penting untuk diperhatikan, karena dapat memberikan dampak pada kinerja guru dalam melakukan tugasnya. Terlebih menurut Ozgenel dan Mert (2019) kinerja guru merupakan unsur kunci dalam keberhasilan efektivitas satuan Pendidikan. Namun berdasarkan beberapa penelitian, guru dalam Implementasi Kurikulum Merdeka ini masih banyak menemui

hambatan. Seperti pada tabel 2 menunjukkan bahwa guru merasa perubahan dalam Kurikulum Merdeka terlalu rumit, salah satunya dalam perubahan RPP menjadi Modul Ajar. Perubahan ini menjadikan guru harus merombak total RPP yang selama ini sudah dirancang, sehingga dengan adanya perubahan RPP menjadikan guru kurang antusias dalam melaksanakan tuntutan dari Kurikulum Merdeka (Fitriyah dan Wardani, 2022). Selain itu, penelitian Fitriyah dan Wardani (2022) juga menemukan bahwa guru belum begitu memahami konteks atau isi dari Kurikulum Merdeka.

Hambatan terkait SDM guru dan tenaga pendidik selanjutnya juga ditemukan oleh Sumarsih et al., (2022) bahwa guru pada tahap awal Implementasi Kurikulum Merdeka banyak menemui kesulitan, seperti 1) Guru dan tenaga pendidik belum terlatih menerapkan pembelajaran sesuai paradigma baru; 2) guru merasa rumit dalam mengurus administrasi pembelajaran sesuai Kurikulum Merdeka, serta ;3) guru mengalami kesulitan dalam adaptasi penggunaan *e-raport*. Beberapa hambatan tersebut tampaknya mengarah pada terbatasnya kemampuan guru, terlebih dalam beradaptasi dengan kurikulum paradigma baru. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu et al., (2021) bahwa wawasan dan pengetahuan guru sebagai bekal implementasi Kurikulum Merdeka tidak memadai karena terbatasnya waktu pelatihan, serta minimnya informasi tentang Kurikulum Merdeka yang diperoleh guru. Problematika Implementasi Kurikulum Merdeka dari segi SDM yang dimiliki oleh guru dan tenaga pendidik tampaknya lebih kompleks daripada problematika lainnya. Hal ini dibuktikan lagi oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Zahir et al., (2022) bahwa sangat tidak dipahaminya perubahan mendasar pada Kurikulum Merdeka baik pada guru, kepala sekolah, maupun pengawas, terutama mengarah pada kekhawatiran hilangnya jumlah jam pelajaran yang berujung pada permasalahan sertifikasi guru.

Penelitian lain oleh Nurcahyono dan Putra (2022) juga menemukan bahwa guru mengalami banyak kesulitan akibat perubahan dalam Kurikulum Merdeka, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Hambatan pada perencanaan pembelajaran meliputi (1) kurangnya pemahaman cara menurunkan/menerjemahkan CP menjadi tujuan pembelajaran; (2) heterogenitas siswa di dalam kelas; (3) kurangnya referensi model pembelajaran berdeferensiasi; (4) keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di sekolah; (5) keterbatasan pengetahuan awal dan materi pelajaran. Hambatan pada pelaksanaan pembelajaran meliputi (1) keterbatasan pemahaman materi pelajaran dengan pengetahuan lain yang relevan; (2) keterbatasan mengakomodasi pertanyaan pembuka; (3) keterbatasan pemahaman psikologis siswa; (4) keterbatasan menerjemahkan pengetahuan ke dalam Bahasa yang mudah dipahami. Hambatan pada evaluasi pembelajaran meliputi (1) paradigma asesmen pendahuluan yang belum sesuai; (2) keterbatasan mengidentifikasi proses pembelajaran; (3) keterbatasan pemahaman penilaian formatif. Hambatan lain terkait kondisi SDM yang dimiliki oleh guru dan tenaga pendidik, Sasmita dan Darmansyah (2022) menemukan bahwa rendahnya *softskill*, rendahnya tingkat pemahaman guru terhadap tuntutan perubahan zaman, serta sulitnya guru dalam beradaptasi dengan perubahan dalam Kurikulum Merdeka, menjadi satu hambatan kompleks yang dapat berdampak pada sukses tidaknya Kurikulum Merdeka diimplementasikan.

Hambatan ketiga adalah terkait kondisi siswa, lingkungan sekolah maupun keluarga. Sumarsih et al., (2022) dalam hasil penelitiannya pada sebuah Sekolah Dasar Penggerak menyebutkan pada tahap awal pengimplementasian Kurikulum Merdeka, hambatan juga berasal dari *mindset* atau pemikiran warga sekolah yang belum terbiasa dengan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Hambatan ini cukup menyita perhatian dan menantang, karena menjadi sebuah tantangan bagi kepala sekolah untuk mengajak guru dan warga sekolah merubah pemikiran mereka agar keluar dari zona nyaman. Hal ini dikarenakan menurut Sumarsih et al., (2022) perubahan yang dilakukan kepala sekolah akan sia-sia apabila *mindset* guru (dan seluruh warga sekolah) tidak mau berubah. Hambatan lain juga ditemukan dalam penelitian Hidayati et al., (2022) dari segi siswa dalam pembelajaran berbasis proyek. Menurut temuannya, salah satu hambatan dalam IKM khususnya pada pembelajaran berbasis proyek, adalah Ketika terjadi ketidak-kompakan antar anggota kelompok proyek. Ketidakkompakan ini berasal dari ketidakcocokan antar anggota, dan selanjutnya menimbulkan ketidaknyamanan dalam menjalankan kegiatannya. Maka perlunya strategi dalam mengkondisikan siswa serta membentuk kelompok yang solid adalah sebuah tantangan besar dalam keberhasilan pembuatan proyek. Selain dari siswa dan warga sekolah, kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar dan keluarga siswa dalam pembelajaran berbasis Kurikulum Merdeka dalam penelitian Anridzo et al., (2022) juga menjadi sebuah hambatan yang harus segera dicari solusinya.

Hambatan keempat adalah hambatan dari segi pemerintah. Menurut hasil penelitian Hidayati et al., (2022) belum sinkronnya *mindset* pemerintah daerah dengan pemerintah pusat terhadap kebijakan Kurikulum Merdeka juga menjadi salah satu hambatan dalam awal pelaksanaan IKM. Hal ini tercermin dari kebijakan pelaksanaan PTS, PAS, dan PAT pada beberapa daerah. Jika mengacu pada Kurikulum Merdeka, seharusnya kegiatan Penilaian Tengah Semester (PTS), Penilaian Akhir Semester (PAS), dan Penilaian Akhir Tahun (PAT) tidak dilaksanakan secara serempak. Namun pada kenyataannya beberapa pemerintah daerah masih melaksanakan kegiatan penilaian secara serempak untuk keperluan pemeringkatan tingkat kabupaten. Selain ketimpangan *mindset* pemerintah terhadap kebijakan Kurikulum Merdeka, hambatan lain juga dipaparkan oleh Rahayu et al., (2021) yaitu kurangnya pelatihan dan pemberian sosialisasi kepada guru tentang konsep Implementasi Kurikulum Merdeka, yang kemudian berdampak pada wawasan dan pengetahuan guru yang tidak matang, tidak mumpuni dan tidak memadai sebagai bekal untuk mengimplementasikan kurikulum yang baru.

Solusi terhadap hambatan Implementasi Kurikulum Merdeka

Tabel 3. Solusi

No	Aspek Hambatan	Solusi
1.	Fasilitas/Sarana-prasarana	1.1 Memaksimalkan penggunaan bantuan pendanaan dari BOS atau BOSDA. Penambahan dana dalam herregistrasi bagi sekolah swasta (Hidayati et al., 2022). 1.2 Bekerjasama dengan orang tua dan dinas setempat untuk mendukung terlaksananya proyek dan semua

pembelajaran berbasis Kurikulum Merdeka (Rahayu et al., 2021)

2. SDM Guru dan Tenaga Pendidik	<p>2.1 Guru dihimbau mengikuti Workshop dan pelatihan yang diadakan oleh lembaga pendidikan maupun swasta (Fitriyah dan Wardani, 2022).</p> <p>2.2 Membentuk komite pembelajar dan mengikuti workshop, mengkombinasikan contoh modul ajar di Platform Merdeka Mengajar dengan kondisi lingkungan sekolah, mempelajari <i>e-Raport</i> sekolah penggerak dan membuat raport proyek penguatan profil pelajar Pancasila secara mandiri (Sumarsih et al., 2022).</p> <p>2.3 Guru diharap mengerahkan kemandiriannya guna mengatasi problematika yang ada (Rahayu et al., 2021).</p> <p>2.4 Diadakan pelatihan atau workshop yang menunjang wawasan guru (Zahir et al., 2022).</p>
3. Siswa, lingkungan, dan keluarga	<p>3.1 Mengadakan sosialisasi kepada tendik dan orangtua mulai dari kelas 1-6 (Sumarsih et al., 2022).</p> <p>3.2 Mengadakan sesi pertemuan antara peserta didik, wali kelas, dan guru BK. (Hidayati et al., 2022).</p>
4. Pemerintah	<p>4.1 Pemberian waktu pelatihan yang lebih panjang, intensif, tidak hanya dilakukan pada guru representatif, namun juga pada semua guru (Rahayu et al., 2021).</p> <p>4.2 Menyelenggarakan Penilaian Tengah Semester (PTS), Penilaian Akhir Semester (PAS), dan Penilaian Akhir Tahun (PAT) tingkat sekolah, yakni soal dan kebijakan semua dari sekolah (Hidayati et al., 2022).</p>

Hambatan-hambatan dalam Implementasi Kurikulum Merdeka tentu memerlukan solusi agar Implementasi Kurikulum Merdeka dapat berjalan dengan lancar dan tercapai semua visi-misi pendidikan. Mengacu pada tabel 3 tentang solusi bagi hambatan yang telah dipaparkan, menurut Hidayati et al., (2022) solusi bagi hambatan terkait fasilitas sarana prasarana dalam IKM adalah dengan memaksimalkan penggunaan bantuan pendanaan dari BOS atau BOSDA. Sedangkan untuk sekolah swasta, pembiayaan ini bisa dimasukkan dalam dana heregistrasi orang tua pada saat awal masuk sekolah. Rahayu et al., (2022) juga memberikan solusi terhadap beberapa hambatan terkait sarana prasarana dalam pembelajaran berbasis projek, yaitu bekerjasama dengan para orang tua dan dinas setempat untuk mendukung terlaksananya projek, karena pentingnya perhatian dan dukungan dari warga sekolah dan dinas setempat sangat menunjang tercapainya tujuan IKM secara merata (Sasmita dan Darmansyah, 2022).

Kompleksitas hambatan dari segi SDM guru dan tenaga pendidik dalam Implementasi Kurikulum Merdeka tentu sangat menyita perhatian. Menurut Nurcahyono dan Putra (2022) problematika pembelajaran (termasuk kondisi SDM guru yang terbatas) adalah suatu masalah

dalam pembelajaran yang harus ditemukan cara penyelesaiannya guna mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai harapan. Salah satu solusi yang dapat diambil menurut Fitriyah dan Wardani (2022) adalah menghimbau guru untuk mengikuti *workshop* dan pelatihan yang menunjang *skill* dan memperkaya informasi mereka dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Solusi serupa juga dipaparkan oleh Zahir et al., (2022) yaitu pihak sekolah atau pemerintah diharap mengadakan pelatihan atau *workshop* yang menunjang wawasan guru. Solusi tersebut juga didukung oleh Sumarsih et al., (2022) yang menyatakan bahwa hambatan yang berasal dari terbatasnya kemampuan guru dapat diatasi dengan membentuk komite pembelajar dan mengikuti *workshop*.

Selain beberapa solusi di atas, dalam mengatasi kesulitan dan kerumitan guru pada tahap awal pengimplementasian Kurikulum Merdeka, seperti mengurus administrasi dan mempelajari *e-raport*, dapat diatasi dengan mengkombinasikan contoh modul ajar di Platform Merdeka Mengajar dengan kondisi lingkungan sekolah, mempelajari *e-Raport* sekolah penggerak sekaligus membuat raport proyek penguatan profil pelajar Pancasila secara mandiri (Sumarsih et al., 2022). Selanjutnya yang menarik dari hasil penelitian Rahayu et al., (2021), ia memberikan solusi bahwa selain mengandalkan kebijakan dari sekolah dan pemerintah, guru juga harus mengerahkan kemandiriannya guna mengatasi problematika yang ada, sebab guru merupakan perantara dari apa yang diinginkan para perumus kurikulum dan hasil implikasinya pada peserta didik.

Selanjutnya pada hambatan yang berasal dari siswa, lingkungan sekolah dan juga keluarga, solusi mengarah pada perbaikan jalinan atau komunikasi antara siswa, warga sekolah, dan juga keluarga. Hal ini sesuai dengan solusi yang dipaparkan oleh Sumarsih et al., (2022) bahwa hambatan yang berasal dari kurangnya dukungan dari lingkungan sekolah dan keluarga dapat diatasi dengan mengadakan sosialisasi tentang Implementasi Kurikulum Merdeka kepada tenaga pendidik dan orangtua mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Selanjutnya terkait hambatan dalam proses pembelajaran berbasis proyek yang berasal dari siswa, menurut Hidayati et al., (2022) dapat diatasi dengan mengadakan sesi pertemuan antara peserta didik, wali kelas, dan guru BK. Pertemuan tersebut dapat diisi dengan mendatangkan narasumber dari luar yang bisa memberikan penguatan dan motivasi tentang pentingnya sebuah Kerjasama, dukungan, dan kekompakan.

Solusi terakhir adalah terkait hambatan yang berasal dari pemerintah. Pada masalah kurangnya waktu pelatihan bagi guru yang kemudian berdampak pada kurang maksimal dan kurang matangnya wawasan yang guru dapatkan, menurut Rahayu et al., (2021) dapat diatasi dengan pemberian waktu pelatihan yang lebih panjang, intensif, tidak hanya dilakukan pada guru representatif, namun merata bagi semua guru. Temuan ini sekaligus menjadi saran bagi pemerintah bahwa pelatihan yang diberikan kepada guru dalam IKM belum sepenuhnya sukses dan merata. Hal ini sesuai fakta di lapangan bahwa masih banyak guru yang belum mendapatkan wawasan yang matang terkait Implementasi Kurikulum Merdeka karena kurangnya pelatihan yang diberikan. Selanjutnya terkait *mindset* pemerintah daerah yang berbeda dengan kebijakan pemerintah pusat khususnya dalam pelaksanaan PTS, PAS, dan PAT, dapat diatasi dengan menyelenggarakan Penilaian Tengah Semester (PTS), Penilaian

Akhir Semester (PAS), dan Penilaian Akhir Tahun (PAT) pada tingkat sekolah, dalam artian soal dan kebijakan semua dibuat oleh sekolah (Hidayati et al., 2022).

Kesimpulan

Implementasi Kurikulum Merdeka yang dalam pelaksanaannya masih cukup baru dan dalam masa adaptasi, tentu tidak terlepas dari adanya hambatan yang menyertai. Hambatan tersebut secara umum berasal dari empat aspek, yaitu 1) terkait fasilitas atau sarana prasarana; 2) kondisi SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimiliki oleh guru dan tenaga pendidik, 3) kondisi dan dukungan dari siswa, lingkungan sekolah dan keluarga, serta; 4) terkait kebijakan dari pemerintah. Secara garis besar, hambatan terkait kondisi SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimiliki oleh guru dan tenaga pendidik adalah paling mendominasi. Hambatan-hambatan tersebut tentu memerlukan solusi agar visi-misi pendidikan berbasis Kurikulum Merdeka dapat tercapai.

Adapun solusi dari hambatan tersebut di antaranya 1) pada aspek fasilitas dan sarana prasarana, dapat diatasi dengan memaksimalkan penggunaan bantuan pendanaan dari pemerintah dan bekerjasama dengan orang tua serta dinas setempat; 2) pada aspek SDM guru dan tenaga pendidik dapat diatasi dengan mengikuti pelatihan atau *workshop* tentang IKM, mendalami materi Kurikulum Merdeka pada *platform* yang telah disediakan, dan guru diharapkan tidak hanya mengandalkan kebijakan dari pemerintah, tetapi juga harus mengarahkan kemandirian dalam mengatasi berbagai permasalahan; 3) terkait kondisi siswa, lingkungan, dan keluarga, dapat diatasi dengan pemberian sosialisasi kepada seluruh warga sekolah termasuk orang tua dan mendatangkan narasumber dari luar untuk menguatkan kekompakan dan kerjasama, terutama dalam pembelajaran berbasis proyek; 4) terkait hambatan dari pemerintah, dapat diatasi dengan pembuatan kebijakan sendiri oleh sekolah berdasarkan Kurikulum Merdeka, seperti pembuatan soal dan kebijakan pelaksanaan evaluasi/penilaian pembelajaran.

Reference

- Arifin, Zainal. 2018. Manajemen Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam: Teori Dan Praktik. Yogyakarta: UIN Press
- Demiris, G., Oliver, D. P., & Washington, K. T.(2019). Defining and analyzing the problem. In Behavioral Intervention Research in Hospice and Palliative Care (pp. 27–39). London: Academic Press. doi: 10.1016/B978-0-12-814449-7.00003-X
- Ferrari, Rosella. (2015). Writing Narrative Style Literature Reviews. *Medical Writing*. Vol. 24, No. 4 https://scholar.google.co.id/scholar_url?url=https://journal.emwa.org/writing-for-lay-audiences/writing-narrative-style-literature-reviews/article/2301
- Hasanah & Habibah. (2021). Implementasi Manajemen Kelas di SD Negeri. *Jurnal Administrasi, Kebijakan dan Kepemimpinan Pendidikan [JAK2P]*. Vol 2, No 2. DOI:[10.26858/jak2p.v2i2.12668](https://doi.org/10.26858/jak2p.v2i2.12668)
- Hidayati, Naning. dkk. (2022). Implementasi Pembelajaran Proyek pada Sekolah Penggerak di Era Digital. *JET: Journal of Education and Teaching*. Vol. 4 No. 1 DOI [10.51454/jet.v4i1.200](https://doi.org/10.51454/jet.v4i1.200)

- Khotimah, Khusnul. dkk. (2022). Strategi Guru dalam Pengelolaan Kelas pada Pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*. Vol. 6 No. 3 DOI [10.31004/basicedu.v6i3.2940](https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2940)
- Lubis, A. Y. (2015). Pelaksanaan Manajemen Kurikulum pada SMA Negeri 1 Buengcala Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Administrasi Pendidikan: Program Pascasarjana Unsyiah*. Vol. 3, No. 1 <https://jurnal.unsyiah.ac.id/JAP/article/view/2522/2369>
- Marzali, Amri. (2016). Menulis Kajian Literatur. *ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia*. Vol. 1, No.2 Hal. 27-36 <https://doi.org/10.31947/etnosia.v1i2.1613>
- Mubarak, Ramdanil. (2021). Peran dan Fungsi Kurikulum dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Multikultural. *Jurnal Studi Islam Lintas Negara*. Vol. 3, No. 2 DOI: [10.37567/cbjis.v3i2.984](https://doi.org/10.37567/cbjis.v3i2.984)
- Nugraha, Toho. (2022). Kurikulum Merdeka untuk Pemulihan Krisis Pembelajaran. *Jurnal Inovasi Kurikulum*. Vol. 19 No. 2 . e- ISSN 2798-1363 DOI <https://doi.org/10.17509/jik.v19i2.45301>
- Oktifa, Nita. 2022. "Istilah Baru yang Ada di Kurikulum Merdeka". *Aku Pintar*. <https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/istilah-baru-yang-ada-di-kurikulum-merdeka> diakses pada 17 Desember 2022 pukul 10.26.
- Rahayu et al. (2021). Hambatan Guru Sekolah Dasar Dalam Melaksanakan Kurikulum Sekolah Penggerak Dari Sisi Manajemen Waktu Dan Ruang Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol 5, No 3. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1869>
- Rahayu, Restu. dkk. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak. *Jurnal Basicedu*. Vol. 6 No. 4 DOI [10.31004/basicedu.v6i4.3237](https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3237)
- Rahmadayanti dan Hartoyo. (2022). Potret Kurikulum Merdeka, Wujud Merdeka Belajar di Sekolah Dasar. *JURNAL BASICEDU*. Vol. 6 No.4 DOI: [10.31004/basicedu.v6i4.3431](https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3431)
- Rosidah. (2018). Strategi Pengelolaan Kelas Efektif dan Efisien dalam Proses Pembelajaran. *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah*. Vol 1, No 2 <http://journal.iaialmawar.ac.id/index.php/jtpm/article/view/115>
- Sasmita & Darmanysah. (2022). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kendala Guru Dalam Menerapkan Kurikulum Merdeka (Studi Kasus: Sdn 21 Koto Tuo, Kec. Baso). *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. Vol. 4, No. 6 DOI <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9154>
- Ulya, Fika. (2022). "Kemendikbud Ristek: 142.000 Sekolah Terapkan Kurikulum Merdeka secara Mandiri". *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/16/17014851/kemendikbud-ristek-142000-sekolah-terapkan-kurikulum-merdeka-secara-mandiri> diakses pada 21 Desember 2022 pukul 23.40
- Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003. Sistem Pendidikan Nasional. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003>